



2024

**PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR**

Laporan Evaluasi Camat Triwulan II

**KECAMATAN KALAENA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 9 (sembilan) Kegiatan 24 (dua puluh empat) yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah;
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan daan Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

5. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum

1. Penyelenggaraan urusna pemerintahan umum sesuai penugasan kepl daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan

Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Camat pada Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Memberikan petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
4. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Kecamatan;
5. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Kecamatan;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
12. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan;
13. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
14. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
15. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati;
16. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan publik;
17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diperjanjikan 2 Sasaran 6 program, Adapun 6 program sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program penunjang urusan pemerinthan daerah kabupten/kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar ('%)	100%
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%
		Administrasi Kepegaawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daera	100%
		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang	100%

		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah yang diadakan ('%)	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ('%)	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan Baik	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%
4.	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100%

5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 4.570.000	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 96.774.000	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 21.394.000	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 22.571.000	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 22.328.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.2.758.235.300	APBD

A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Camat melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian dalam pertriwulan.

Tabel 2.3
Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran T.A 2024 Camat

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR	100%	1.168.598.675	100%	732.480.487	100%	364.257.394	100%	325.306.744
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu (%)	100%	7.137.250	100%	7.005.200	100%	9.542.000	100%	9.462.050
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.250.000	1 Dok	4.967.500	1 Dok	4.804.000		2.250.000
	Kordinsi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		-	-	-	1 Dok	2.687.500	1 Dok	2.615.000
	Kordinsi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 dok	2.658.850	-	-	-	-	1 dok	2.598.350

Evalusi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok	2.228.400	2 Dok	2.307.700	2 Dok	2.050.700	2 Dok	2.007.200
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	931.814.525	100%	560.996.637	100%	190.658.044	100%	190.628.044
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16	925.921.475	16	555.552.887	16	185.184.294	16	185.184.294
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	3	5.893.050	3	5.443.750	3	5.473.750	3	5.443.750
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	3.708.750	100%	3.143.750	100%	3.343.750	100%	3.143.750
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	3.708.750	1	3.143.750	1	3.343.750	1	3.143.750
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	3.741.750	100%	2.918.750	100%	3.514.750	100%	2.918.750
-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	3.741.750	3	2.918.750	3	3.514.750	3	2.918.750
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	17.622.000	100%	1.236.500	100%	14.702.500	100%	1.234.500

	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	1.362.000	3	1.236.500	3	1.292.500	3	1.234.500
	Bimbingan Teknis implementasi Perpu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	16.260.000			1	13.410.000		
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	116.707.500	100%	59.636.250	100%	74.261.250	100%	59.546.250
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakanJumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	644.000	6	382.000	6	382.000	6	382.000
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13 Paket	1.052.500	17 Jenis	804.250	17 Jenis	1.038.250	17 Jenis	804.250
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yng disediakan	5	2.760.000	5	2.410.000	5	2.760.000	5	2.320.000
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	1.470.000	12	1.470.000	12	1.470.000	12	1.470.000
-	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	3	53.800.000	3	16.350.000	3	27.900.000	3	16.350.000

-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	57.230.000	3	38.290.000	3	40.960.000	3	38.290.000
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan	100%	14.000.000	100 %	40.150.000				
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	14.000.000	1	12.000.000				
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3	28.150.000				
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	57.212.900	100 %	54.098.400	100 %	57.050.900	100 %	54.098.400
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	2.402.500	3	2.238.000	3	2.240.500	3	2.238.000
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	3	9.110.400	3	9.110.400	3	9.110.400	3	9.110.400
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	2.950.000			2	2.950.000		
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	42.750.000	3	42.750.000	3	42.750.000	3	42.750.000

9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan Baik	100	16.654.000	100	3.295.000	100	11.184.000	100	4.275.000
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	10.474.000	7	2.795.000	7	8.594.000	7	2.435.000
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11	6.180.000	1	500.000	4	2.590.000	3	1.840.000
0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DN PELAYANAN PUBLIK	100%	1.378.000	100%	1.018.000	100%	1.120.000	100%	1.054.000
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yng dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	1.378.000	100%	1.018.000	100%	1.120.000	100%	1.054.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang di laksanakan	1	1.378.000	1	1.018.000	1	1.120.000	3	1.054.000
0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	100%	41.139.000	100%	16.682.500	100%	22.270.000	100%	16.628.500

KELURAHAN		KELURAHAN											
	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa;	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	41.139.000	100%	16.682.500	100%	22.270.000	100%	100%	16.628.500		
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	10.893.500	-	-	-	-	-	-	-		
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	30.245.500	3	16.628.500	3	22.270.000	3	16.682.500			
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100	6.394.000	100	4.915.000	100	5.125.000	100	4.915.000			
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	5.325.000	100%	4.625.000	100%	4.765.000	100%	4.625.000			
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.378.000	1 Laporan	3.025.000	1 Laporan	3.095.000	1 Laporan	3.025.000			

	Koordinasi Penerpam dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	1.069.000	100%	290.000	100%	360.000	100%	290.000
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negar Republik Indonesia	1	1.069.000	1	290.000	1	360.000	1	290.000
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN	100	4.483.500	100	6.000.000	100	6.087.500	100	6.000.000
	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	4.483.500	100	6.000.000	100	6.087.500	100	6.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi di Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	3	4.483.500	3	6.000.000	3	6.087.500	3	6.000.000
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN YANG PERUNDANGAN YANG	100	8.742.750	100	2.498.250	100	2.700.250	100	8.386.750

	BERLAKU											
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	8.742.750	100	2.498.250	100	2.700.250	100	8.386.750			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	5.969.000					14	5.888.500			
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7	2.773.750	7	2.498.250	7	2.700.250	7	2.498.250			

BAB III REALISASI KINERJA

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi pada triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut;

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan target pada triwulan II yaitu 1 Dokumen dan terelisasi 1 sehingga capainya 100%. Jumlah dokumen yang terealisasi pada sub kegiatan ini yakni Dokumen Perizinan non usaha TW II meliputi kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan permintaan jumlah laporan penduduk, pendataan rekapitulasi dan mutasi kependudukan, pelayanan rekomendasi, dokumentasi dan publikasi kegiatan pemerintahan kecamatan, pemantauan dan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal kebersihan wilayah..

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Triwulan II			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat :	100	100	100	
	1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	1	1	100	Sangat Baik
Jumlah		1	1	100	
Jumlah rata-rata		100%			

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator program ini adalah persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Target yang ditetapkan 100% dan capaian kinerjanya sebesar 100%. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa.*

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa kegiatan ini telah terlaksana di Triwulan I.

➤ *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

Indikator sub kegiatan ini Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target 3 Laporan dan realisasi 3 Laporan sehingga capaian kinerjanya 100%. Telah tercapai sesuai dengan target kinerja sebanyak 3 laporan yang disusun 1 kali dalam perbulannya dalam 1 Triwulan yaitu Laporan Pelaksanaan Kegiatan TW II.

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Triwulan II			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Keluarahan	100	100	100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	Sangat Baik
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	3	100	
	Jumlah	3	3	100	
	Jumlah rata-rata	100%			

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator program ini adalah persentase rata-rata kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% dengan formulasi sebagai berikut: Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah :

No	Sub Kegiatan	Triwulan II			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	

	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	100	
	2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1	100	
Jumlah		2	2	200	
Jumlah rata-rata		100			
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	
	1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1	100	
Jumlah		1	1	100	
Jumlah rata-rata		100%			

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator program ini adalah persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% dengan formulasi sebagai berikut: Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah :

No	Sub Kegiatan	Triwulan II			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	100	100	100	Sangat Baik

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	3	100	Sangat Baik
Jumlah	3	3	100	100%
Jumlah Rata-Rata	100%			

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator program ini adalah Persentase Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Target yang ditetapkan 100% capaian Kinerjanya sebesar 100% dengan tabel capaian sebagai berikut :

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah :

No	Sub Kegiatan	Triwulan II			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	Sangat Baik
	1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	-	-	-	Sangat Baik
	2. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7	7	100	
Jumlah		7	7	100	
Jumlah rata-rata		100%			

BAB IV REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan pada Teknis dan Sekretariat disajikan pada tabel berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	TRIWULAN II		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.595.793.300	732,480,487	803,758,177	110%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.570.000	1,018,000	65,000	6%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	96.774.000	16,682,500	21,632,580	130%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.349.000	4,915,000	4,038,500	82%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.571.000	6,000,000	3,985,000	66%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.328.000	2,498,250	4,816,250	193%
Jumlah		2.758.235.300	763,594,237	838,295,507	
Rata-rata Capaian Keuangan		110%			

BAB V PENUTUP

Capaian Realisasi Kinerja Dan Realisasi Keuangan dalam pelaksanaan program pada seksi dapat dilihat pada tabel berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
100%	110%

Kesimpulan :

1. Rata-rata Capaian keuangan mencapai 110% dikarenakan spj triwulan I terealisasi di triwulan II.

Kalaena Kiri, 28 Juni 2024

Camat Kalaena,

H. MARSUKI, S.Pd.,MM

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. :19691025 199802 1 004